

TAJUK RENCANA

'Reshuffle' dan 'Grand Design' Pendidikan

DUNIA pendidikan Indonesia acap disebut belum menemukan formulasi yang tepat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Anekdote *ganti menteri ganti kebijakan* kerap dituding menjadi penyebabnya. Bahkan dunia pendidikan yang diharap menjadi tempat persemaian calon pemimpin bangsa, kerap terkesan tergegap-gagap.

Namun ada kejutan dari pemerintah, yang sungguh tidak terduga. Meminjam istilah pakar pendidikan Prof Suyanto PhD (KR, 17/4) kado kejut dunia pendidikan beberapa lalu diberikan DPR RI yang telah mengetokkan palu. Selain membentuk Kementerian Investasi, ada ketokan untuk menggabungkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Riset dan Teknologi. Penggabungan kembali pendidikan-kebudayaan dengan ristek di tengah jalan pemerintahan ini, cukup mengejutkan. Mengingat apresiasi diberikan pada periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi, yang memisahkan dikbud dengan ristek.

Tetapi ini adalah hak prerogative presiden. Hanya santernya isu *reshuffle* memang membuat banyak pihak cemas, *dheg-dhegan*. Karena ketika diiringi dengan hembusan isu *reshuffle* kabinet, aromanya menjadi berbeda. Isu lain pun mengiringi.

Pertanyaan jelasnya muncul. Dengan peleburan kedua kementerian ini apakah Nadiem masih akan menjadi menteri? Kalau ganti, bagaimana nanti kebijakan-kebijakan *out of the box* yang digagas Mendikbud Nadiem Makarim sekarang? Pertanyaan yang hakikatnya menunggang kekhawatiran *ganti menteri ganti kebijakan*, yang terasa 'sangat biasa' di dunia pendidikan bahkan sangat akrab di telinga. 'Kebijakan' yang selama ini dinilai berperan besar dalam membuat amburadulnya konsep-konsep pendidikan yang baru dilaksanakan atau

bahkan baru dimulai.

Hiruk pikuk dunia pendidikan ini mengingatkan akan pentingnya *grand design* pendidikan yang akan menuntun ke arah mana pendidikan di negeri hendak dibawa. Disain besar pendidikan untuk memulai 'perbaikan' pendidikan yang ada – bagaimana prosesnya – dan bagaimana *output*-nya. Disain yang akan 'mengikat' siapa pun yang menjadi menteri pendidikan untuk menjalankan konsep yang sudah disepakati. Disain yang akan membawa arah ke target yang telah ditentukan. Sehingga *reshuffle*, ganti periodisasi pemerintahan pun, tidak akan mengganggu upaya pembangunan SDM berkualitas.

Tanpa *grand design* membuat kebijakan pendidikan berubah-ubah. Seperti dikatakan pemerhati pendidikan UM Malang, Asri KD, meski setiap mendikbud memiliki kebijakan yang baik, namun seringkali hanya berlaku lima tahun. Kemudian nyaris tanpa ada evaluasi dan hampir tidak ada keberlanjutannya. Akibatnya, pendidikan di Indonesia tidak mengalami kemajuan signifikan. Karena tidak terjadi keberlanjutan dari hasil pendidikan sebelumnya. (bhirawaonline, 24/11/2020).

Memang sekarang pemerintah bersama DPR sedang membahas peta pendidikan 2020-2035. Mungkin ini adalah *grand design* pendidikan. Namun peta jalan ini masih membingungkan banyak pihak bahkan dimulai dengan kontroversi, hilangnya diksi agama. Selain peta tersebut juga belum ada kejelasan dimana titik dimulai, target yang hendak dicapai bahkan beayanya agar tujuan tercapai.

Peta jalan pendidikan adalah penunjuk arah perjalanan pendidikan yang akan dilakukan dari titik tertentu menuju titik tertentu. Maka, harus menempatkan diri di titik awal untuk memulainya. Jika belum tahu darimana, lalu sebenarnya hendak kemana? □

Pendidikan Tanpa Kecurangan

BARU-BARU ini, masyarakat dikejutkan dengan berita kecurangan yang dilakukan oknum kepala sekolah dan guru SMP pada Asesmen Standar Pendidikan Daerah (ASPD) yang dilaksanakan 5-8 April. Keduanya disinyalir telah membocorkan soal Matematika pada siswa sebelum diujikan (KR, 14/04). Perilaku mereka tidak hanya menjatuhkan profesi guru namun juga mencoreng wajah pendidikan kita. Apapun motifnya, tindakan tersebut sangat mencederai hakikat pendidikan.

Sebenarnya, kecurangan akademik bukanlah hal baru dalam dunia pendidikan kita. Sejak Ujian Nasional masih diberlakukan, kecurangan-kecurangan akademik kerap terjadi. Kalau dirunut, kejadian kecurangan dalam suatu ujian akhir bukan terjadi tanpa sebab. Selama ini, ujian akhir dianggap sebagai ajang pertarungan gengsi bagi banyak pihak. Mulai siswa, orang tua, sekolah, masyarakat maupun pemerintah. Kegagalan dalam memperoleh hasil maksimal dianggap sebagai sebuah aib. Karena itulah setiap sekolah berusaha menetak lulus dengan nilai setinggi-tingginya.

Diwakili Angka

Harus diakui bahwa keberhasilan dalam suatu jenjang pendidikan masih diwakili angka yang didapat terutama dari ujian akhir. Tuntutan yang berlebihan terhadap hasil akhir membuat banyak pihak menghalalkan berbagai cara untuk mencapai hasil yang tinggi. Apalagi nilai yang diperoleh siswa menjadi salah satu tiket untuk mendapat tempat di sekolah lanjutan yang diinginkan. Selama nilai ujian akhir, entah apapun namanya, masih digunakan sebagai syarat mendaftarkan di sekolah lanjutan, maka segala bentuk kecurangan akademik tetap akan terjadi.

Roig & Caso dalam *Lying and Cheating* mengatakan bahwa kecurangan akademik meliputi tiga hal. Yaitu mencontek dalam test (*cheating*), penipuan dalam belajar (*fraudulent*) dan plagiarisme (*plagiarism*). Praktik-prak-



KR-JOKO SANTOSO

bahwa generasi muda pun bisa menjadi pelaku korupsi. Sikap menggampangkan segala cara dalam memperoleh nilai yang tinggi akan memicu siswa menjadi pelaku korupsi intelektual. Dikhawatirkan, kelak akan menjadi pelaku korupsi yang sebenarnya.

Dengan kejadian ini, semua pihak yang terkait dengan pendidikan harus menyamakan pandangan kembali tentang tujuan pendidikan. Menurut pasal 3 UU No Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Maka,

apabila mulai proses belajar sampai ujian ternyata membuka celah untuk melakukan kecurangan akademik, maka tujuan pendidikan tidak pernah tercapai.

Murni

Langkah paling tepat adalah menjadikan setiap hasil ujian benar-benar murni untuk mengukur kemampuan siswa dalam belajar. Rata-rata nilai yang diperoleh siswa hanya dijadikan dasar pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap sekolah tersebut. Intinya, sekolah yang nilai rata-rata ujian masih di bawah standar yang ditetapkan pemerintah harus meningkatkan kualitasnya. Sedangkan sekolah yang telah mampu mencapai nilai standar atau bahkan lebih tinggi harus terus menjaga kualitasnya.

Evaluasi pada suatu sekolah tidak hanya diadakan berdasarkan hasil ujian terakhir siswa semata namun pada setiap ujian yang dilakukan siswa. Pengawasan pada proses pembelajaran sangat penting tidak hanya untuk memastikan bahwa sekolah melakukan pembelajaran dengan benar namun juga untuk meningkatkan rasa percaya diri siswa. Bila rasa percaya diri siswa tinggi, maka keinginan untuk berbuat curang tidak akan ada. Sedang untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya, siswa diharuskan mengikuti suatu ujian tersendiri seperti layaknya ujian masuk perguruan tinggi agar celah kecurangan akademik dapat ditutup rapat. □

***) Lilis Umni Faiezah Spd MA, Guru MT&N 6 Sleman, lulusan Curtin University Australia**

PIKIRAN PEMBACA
Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA
pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000
dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Proyeksi Digitalisasi Pendidikan

REVOLUSI pendidikan merupakan suatu kencana dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Guru sebagai fasilitator, motivator, dan evaluator pendidikan harus memiliki keterampilan yang paripurna pada abad 21 yang melingkupi kemampuan Critical Thinking, Problem Solving, Collaboration Skills, Creativity Skills, dan Communications Skills serta mampu membentuk siswa berdasarkan lima standar nilai utama pendidikan karakter yaitu religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas.

Thomas Lickona dalam karyanya 'Educating for Character' merupakan pakar pendidikan karakter dan David Buckingham dalam karyanya 'The Media Education Manifesto' merupakan pakar media dan komunikasi pendidikan. Mereka sepakat bahwa untuk meningkatkan pendidikan suatu bangsa maka yang dikembangkan adalah sikap atau karakter, literasi digital, dan praktek. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara tentang olah hati (sikap/karakter), olah pikir (literasi), dan olah raga (keterampilan).

Proyeksi digitalisasi pendidikan banyak dilakukan di negara-negara maju dalam bidang pendidikan seperti Finlandia, China, Kanada, Korea Selatan, dan Selandia Baru. Hal ini dilihat dari sistem pendidikan yang futuristik, sekolah yang menyenangkan, dan perolehan skor yang tinggi dari Programme for International Student Assessment (PISA). Karakter dan penguasaan media digital pendidikan serta kemampuan beradaptasi dan berkolaborasi untuk menghasilkan prestasi merupakan sua-

tu hal yang pasti di era disrupsi.

Pendidikan di negara maju sudah berupaya meningkatkan segala sesuatu yang bersifat kertas. Selain untuk menjaga keseimbangan alam, hal ini juga ditujukan untuk penghematan biaya cetak dan distribusi. Proyeksi digitalisasi pendidikan dimulai dengan menghilangkan ketergantungan pada kertas dengan mengubahnya dalam bentuk digital dan menyimpannya dalam teknologi Cloud Computing. Siswa tidak perlu membawa buku ke sekolah, mereka hanya membawa tablet atau HP Android. Papan tulis digital (SmartBoard) dan meja digital (SmartTable), sistem proyeksi kelas yang memiliki Artificial Intelligence (AI) seperti Google Assistant berhologram.

Penugasan siswa dengan presentasi digital serta penggunaan E-Rapor, dan kurikulum berstandar internasional yang terkoneksi dengan pendidikan global seperti kurikulum Cambridge, sehingga lulusan Indonesia akan mampu melanjutkan pendidikan ke luar negeri tanpa adanya konversi.

Guru sebagai Imigrants Digital harus mampu menyesuaikan dengan siswa yang merupakan Natives Digital. Tidaklah mungkin guru mengajarkan materi yang telah usang dan tidak dibutuhkan oleh siswa di masa depan. Proyeksi digitalisasi pendidikan merupakan suatu terobosan fenomenal dalam peningkatan mutu pendidikan serta merupakan upaya untuk mengantarkan tunas bangsa menjadi setara dengan bangsa-bangsa di dunia.

***) Eko Prasetyo SPd MPd, Guru Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta**

Pancasila- Bahasa Indonesia dalam Pendidikan Kita

BELUM hilang dari ingatan geger hilangnya diksi agama dalam visi pendidikan yang dirumuskan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Walau dikemudian hari mas menteri mengakui visi tersebut baru draft dan akan diperbaiki dengan memasukan agama dalam visi pendidikan nasional. Sekarang muncul lagi persoalan hilangnya mata kuliah wajib Pendidikan Pancasila dan Bahasa Indonesia di perguruan tinggi pada standar nasional pendidikan (SPN). Ironisnya, sudah ditandatangani presiden dalam bentuk peraturan pemerintah no 57 tahun 2021 tentang sistem pendidikan nasional (SPN). Lagi-lagi Mas Menteri Nadiem mengeluarkan pernyataan bahwa ada kelupaan dan kesalahan yang kemudian akan diajukan revisi ke presiden.

Belajar dari kasus hilangnya diksi agama, tidak dimasukkannya mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Bahasa Indonesia agak sulit dipahami jika hanya keteledoran semata tanpa ada alasan. Sebuah gagasan besar pasti ada alas pikir yang melatarbelakanginya. Disisi lain dokumen yang sebegitu penting yang menentukan masa depan pendidikan bangsa ini harusnya sudah melalui berbagai kajian dan telaah baik dari sisi konten yang substansial maupun redaksional. Jadi apa yang sesungguhnya terjadi hanya mas menteri, tim dan tentu Tuhan Yang Maha Kuasa yang tahu.

Memahami Pendidikan

Disaat baru diangkat menjadi Menteri Pendidikan, Mas Menteri menyampaikan analisa berbagai masalah pendidikan kita, dengan memasukan startegi menghadapi tantangan revolusi industri 4.0. Sebagai bagian dari anak muda dan sukses memanfaatkan teknologi di era 4.0 dengan GoJek-nya, pandangan dan

strategi mas menteri membawa harapan baru bagi dunia pendidikan. Sayangnya dunia pendidikan itu bukan industri yang bisa menggunakan permodelan rumus pasti, jika jika diterapkan aturan x maka hasilnya pasti y.

Pendidikan itu gerakan kebudayaan yang harus berangkat dan berakar dari kebudayaan suatu bangsa, dan keberhasilan pendidikan itu tidak hanya bisa diukur oleh angka-angka statistik dan capaian-capaian materialistik. Termasuk pendidikan nasional kita harus berangkat dari akar budaya bangsa Indonesia yang dilandasi oleh kesepakatan bersama yang salah satunya yaitu Pancasila.

Pancasila adalah landasan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjadi kesepakatan bersama bangsa ini. Menghilangkan Pancasila sebagai bahan ajar kepada generasi muda berarti membiarkan para generasi muda kita tidak memahami landasan moral dan etik yang menjadi kesepakatan bersama pembentukan bangsa ini. Pemahaman tentang landasan moral dan etik Pancasila bagi mahasiswa penting untuk ukuran dan standar kehidupan mereka kelak dalam berbangsa dan bernegara. Begitupun dengan Bahasa Indonesia yang merupakan bahasa kesepakatan pendiri bangsa ini sebagai bahasa persatuan. Menghilangkan mata kuliah bahasa Indonesia seakan-akan ahistoris terhadap perjuangan bangsa ini.

Pembelajaran pendidikan agama, Pendidikan Pancasila dan Bahasa Indonesia tidak bisa

dipandang sebagai mata pelajaran/kuliah yang hanya bersifat teknis dan kognitif belaka. Mata kuliah ini terkait dengan nilai (value) yang diyakini dan mengakar di Bangsa Indonesia, yang tidak hanya dipahami oleh peserta didik sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Akan tetapi harus terinternalisasi di dalam kehidupan peserta didik.

Boleh jadi secara individu-individu peserta dapat sukses menjalani pendidikan bahkan sukses di kehidupan tanpa mendapatkan Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia bahkan agama sekalipun. Tetapi sebagai generasi suatu bangsa yang akan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tentu akan menimbulkan persoalan dalam interaksi kehidupan bangsa ini kelak. □

***) Arif Jamali Muis, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY dan Guru SMAN 5 Yogyakarta**

Pojok KR

Larangan mudik untuk kebaikan bersama
-- Teknologi komunikasi sudah memperpendek jarak

Pemudik di Sukoharjo wajib karantina 14 hari
-- Habis cutinya

Warga DIY diperbolehkan mudik lokal
-- Hanya antarkabupaten bukan antarprovinsi

Berabs

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirnon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurika Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSos.

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting) **Alamat Percepatan:** Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab peretakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM. **Bank:** Bank BNI - Rekening: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.
Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. **Semarang :** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro : Isdiyanto Isman SIP. **Banyumas :** Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro : Driyanto.
Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsiti. **Magelang :** Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro : Drs M Thoha. **Kulonprogo :** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprpto, SPd Kepala Biro : Asrul Sani. **Gunungkidul :** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu' Rp 90.000,00, Iklan Umum/Diagram Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarang...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris) Rp 12.000,00/baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan - Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.